GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: KOMPAS**	**Tanggal**	**: 28 September 2006**
Subyek	**: Lapindo**	**Hari**	**: Kamis**
		Halaman	**: 1**

Presiden: Lumpur Lewat Porong

Menneg LH Nyatakan Pembuangan ke Laut sebagai "Force Majeur"

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi petunjuk untuk mengalirkan lumpur panas ke laut melalui Sungai Porong, Sidoarjo. Tiga pompa dengan kapasitas 1.000-1.500 meter kubik per jam akan dioperasikan untuk mengalirkan lumpur panas tanpa pengolahan sedikit pun mulai 5 Oktober 2006.

Dengan kapasitas pompa seperti itu, setiap hari sekitar 50.000 meter kubik lumpur panas akan dialirkan ke laut melalui Sungai Porong. Arahan Presiden disampaikan dalam rapat kabinet paripurna tentang penanganan lumpur panas akibat kekeliruan operasi PT Lapindo Brantas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/9).

Selain dibuang ke laut, lumpur panas yang menyembur rata-rata 126.000 meter kubik per hari akan ditampung di areal lahan seluas 435 hektar yang diberi tanggul. Lumpur itu akan dimanfaatkan untuk industri bahan bangunan. Industri pengolahan lumpur panas akan dibangun di Desa Ngoro dan Krian, Sidoarjo.

"Kawasan sekitar 400 hektar yang kini tergenang lumpur dan diberi tanggul dinyatakan sebagai daerah rawan bencana dan tidak layak ditinggali," ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai sidang kabinet paripurna.

Djoko didampingi Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar yang memberi jaminan keamanan lingkungan, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, dan Kepala Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo Basuki Hadimuljono.

Untuk memukimkan kembali sekitar 3.000 keluarga korban lumpur panas, Presiden menekankan agar tidak hanya rumah baru yang diberikan, tetapi juga penghidupan dan ganti rugi yang wajar. Presiden meminta tanggul yang ada diperkuat dan dipelihara agar daerah yang terendam lumpur tidak semakin luas. Presiden pun meminta upaya menutup sumber semburan lumpur panas terus dilakukan.

"Semua biaya ditanggung Lapindo Brantas. Diperkirakan dana yang dibutuhkan dan yang bisa dihitung kini sekitar Rp 1,5 triliun," ujar Basuki Hadimuljono

Menteri PU menambahkan, jalan tol tidak mungkin ditinggikan atau membuat jalan layang. "Jalan tol akan dipindahkan," ujarnya.

Bersamaan dengan pemindahan jalan tol, jalur pipa gas yang melayani kebutuhan 213 industri di Jatim juga dipindahkan. Jalur pipa gas sepanjang tiga kilometer berada di sisi jalan tol, yang sebagian ruasnya terendam. "Untuk jalur rel kereta api akan dicarikan rute baru," ujar Djoko.

Basuki mengemukakan, karena semburan lumpur panas cenderung tidak berkurang, kemungkinan luasan daerah yang terendam dapat bertambah. Pembuangan lumpur ke laut dengan tiga pompa mengalirkan sepertiga semburan lumpur yang nyaris tidak bisa dihentikan.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Hukum

Seusai sidang kabinet, Menko Kesra Aburizal Bakrie yang ditanya tentang unjuk rasa Greenpeace di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra menyatakan, "Tegakkanlah hukum. Negara ini negara hukum. Apa (demonstrasi) itu sesuai dengan hukum?"

Saat disampaikan bahwa demonstrasi itu dilakukan untuk memprotes Bakrie, ia mengemukakan, "Apa urusannya Bakrie di Kantor Menko Kesra? Greenpeace itu tidak mengerti apa-apa. Apakah mereka Greenpeace yang bener, saya tidak tahu. Saya kira kalau Greenpeace itu pinter."

Aburizal menilai demonstrasi Greenpeace itu tidak proporsional karena sampai sekarang pemerintah belum menemukan kesalahan PT Lapindo Brantas.

Sebelum mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, kemarin, Rachmat Witoelar menyatakan, sebagai bagian dari pemerintah, mau tidak mau dia harus mengikuti kebijakan pemerintah membuang lumpur ke laut melalui Sungai Porong meskipun dampaknya terhadap pencemaran tak terelakkan.

Pasalnya, pembuangan lumpur ke laut merupakan force majeur atau keterpaksaan, dengan pertimbangan luapan lumpur panas sudah masuk kategori membahayakan masyarakat.

"Kementerian Negara LH bagian dari negara (pemerintah). Kalau negara memutuskan seperti itu, KLH tidak boleh mempunyai agenda sendiri. Apalagi keadaan ini merupakan keadaan darurat yang membahayakan manusia," ujar Rachmat.

Ia menyatakan, keputusan membuang lumpur ke laut diambil untuk melindungi masyarakat Porong dan Sidoarjo. "Manusia dulu yang harus diselamatkan," ujarnya.

Basuki menyatakan hal senada. "Kalau bahayanya, tidak ada. Lumpurnya tidak mengandung racun (B3). Kalau pencemaran itu hanya tingkat pencemaran yang kecil," ujarnya.

Dihentikan

Penyambungan pipa baja sepanjang 16,5 kilometer untuk membuang air lumpur ke laut telah dihentikan. Pembuangan melalui pipa ini dianggap kurang efektif mengurangi volume lumpur di kolam penampungan. Karena itu, lumpur akan dialirkan ke Sungai Porong yang lebarnya sekitar 100 meter.

Pipa baja berdiameter 18-20 inci yang rencananya digunakan membuang air lumpur ke Selat Madura telah tersambung sepanjang sekitar 10 kilometer.

Pipa besi yang terpasang itu menyusur tanah bantaran Kali Porong ke arah timur menuju Selat Madura. Desa yang dilalui pipa itu meliputi Desa Besuki, Keboguyang, Permisan Bangunsari, Tanjungsari, dan Tegalsari.

Potongan pipa yang rencananya akan disambung dari Desa Tegalsari hingga bibir pantai telah disiapkan di Desa Tegalsari. Dari 660 batang yang dibutuhkan, telah siap 212 batang.

Hingga kemarin sejumlah pekerja dari kontraktor penyambungan pipa, PT Sadina, masih membuat siku pipa di Desa Tegalsari. Menurut Suwabi, pengawas lapangan, pihaknya tengah membuat 52 siku pipa. "Siku tersebut rencananya untuk membelokkan pipa ke dalam tanah," ujarnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Bantuan Presiden

Berkaitan dengan santunan untuk korban lumpur, Rabu kemarin, 733 warga Desa Kedungbendo RT 1 hingga RT 6 mendapat giliran pertama menerima uang bantuan Presiden. Tiap keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000.

Total uang bantuan sebesar Rp 1 miliar tersebut diberikan Presiden saat berkunjung ke tempat penampungan pengungsi di Pasar Baru Porong, 11 Agustus lalu.

Sementara itu, sampai kemarin belum ada upaya membersihkan lumpur setinggi 1,5 meter dari badan jalan tol ruas Porong-Gempol Kilometer 37,600-37,900 yang terendam lumpur dua hari sebelumnya.

Berdasarkan pemantauan sekitar pukul 15.00, kemarin yang dilakukan adalah penguatan tanggul di sekitar Kilometer 37,900 dengan tiga ekskavator.(INU/HAR/JAN/WER/LAS/THY)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup